



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA

NOMOR : 100.3.3.3/2/436.1.2/2026

TENTANG

KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/224/436.1.2/2024 tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Surabaya, dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/224/436.1.2/2024 tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 43);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 67);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 68);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 24);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 90);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 74);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 53);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 76);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 47);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 80);

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 61);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 83);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 84);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85);
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 86);
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 91);

33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 115);
34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 93);
35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 105);
36. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 95);
37. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 137 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 136);
38. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 118);

39. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 119);
40. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Griya Wreda dan Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 120);
41. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 121);
42. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 122);
43. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 127);
44. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 63);

45. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 129);
46. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transprtasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 130);
47. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 131);
48. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 85);
49. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 132);
50. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 133);
51. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 48);

52. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 138);
53. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8);
54. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 42);
55. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 81);
56. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 41);
57. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 42);
58. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 49 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 49);
59. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 50);
60. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 52);
61. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 55);

- 62. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 62);
- 63. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/224/436.1.2/2024 tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2026

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan Yth :

- 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
- 2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya;
- 3. Sdr. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/2/436.1.2/2026
TENTANG
KODE WILAYAH UNTUK TATA
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretaris Daerah

436.	1		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
436.	1.	1	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
436.	1.	2	Bagian Hukum dan Kerjasama
436.	2		Asisten Perekonomian dan Pembangunan
436.	2.	1	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
436.	2.	2	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
436.	3		Asisten Administrasi Umum
436.	3.	1	Bagian Umum dan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
436.	3.	2	Bagian Organisasi
436.	4.	1	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
436.	4.	2	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
436.	4.	3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
436.	5		Sekretariat DPRD
436.	6		Inspektorat

DINAS

436.	7.	1		Dinas Pendidikan
436.	7.	2		Dinas Kesehatan
436.	7.	2.	1.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie
436.	7.	2.	2.	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
436.	7.	2.	3.	Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini
436.	7.	2.	3.	1 Puskesmas Tanjungsari
436.	7.	2.	3.	2 Puskesmas Simomulyo
436.	7.	2.	3.	3 Puskesmas Manukan Kulon
436.	7.	2.	3.	4 Puskesmas Balongsari
436.	7.	2.	3.	5 Puskesmas Asemrowo
436.	7.	2.	3.	6 Puskesmas Sememi
436.	7.	2.	3.	7 Puskesmas Benowo
436.	7.	2.	3.	8 Puskesmas Jeruk
436.	7.	2.	3.	9 Puskesmas Lidah Kulon
436.	7.	2	3.	10 Puskesmas Lontar
436.	7.	2	3.	11 Puskesmas Peneleh
436.	7.	2	3.	12 Puskesmas Ketabang
436.	7.	2.	3.	13 Puskesmas Kedungdoro
436.	7.	2.	3.	14 Puskesmas Dr. Soetomo
436.	7.	2.	3.	15 Puskesmas Tembok Dukuh
436.	7.	2.	3.	16 Puskesmas Gundih

436.	7.	2.	3.	17	Puskesmas Tambakrejo
436.	7.	2.	3.	18	Puskesmas Simolawang
436.	7.	2.	3.	19	Puskesmas Perak Timur
436.	7.	2.	3.	20	Puskesmas Pegirian
436.	7.	2.	3.	21	Puskesmas Sidotopo
436.	7.	2.	3.	22	Puskesmas Wonokusumo
436.	7.	2.	3.	23	Puskesmas Krembangan Selatan
436.	7.	2.	3.	24	Puskesmas Dupak
436.	7.	2.	3.	25	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
436.	7.	2.	3.	26	Puskesmas Sidotopo Wetan
436.	7.	2.	3.	27	Puskesmas Kenjeran
436.	7.	2.	3.	28	Puskesmas Rangkah
436.	7.	2.	3.	29	Puskesmas Pacarkeling
436.	7.	2.	3.	30	Puskesmas Gading
436.	7.	2.	3.	31	Puskesmas Pucang Sewu
436.	7.	2.	3.	32	Puskesmas Mojo
436.	7.	2.	3.	33	Puskesmas Kalirungkut
436.	7.	2.	3.	34	Puskesmas Medokan Ayu
436.	7.	2.	3.	35	Puskesmas Tenggilis
436.	7.	2.	3.	36	Puskesmas Gunung Anyar
436.	7.	2.	3.	37	Puskesmas Menur
436.	7.	2.	3.	38	Puskesmas Klampis Ngasem
436.	7.	2.	3.	39	Puskesmas Mulyorejo
436.	7.	2.	3.	40	Puskesmas Sawahan
436.	7.	2.	3.	41	Puskesmas Putat Jaya
436.	7.	2.	3.	42	Puskesmas Pakis
436.	7.	2.	3.	43	Puskesmas Banyu Urip
436.	7.	2.	3.	44	Puskesmas Jagir
436.	7.	2.	3.	45	Puskesmas Wonokromo
436.	7.	2.	3.	46	Puskesmas Ngagel Rejo
436.	7.	2.	3.	47	Puskesmas Kedurus
436.	7.	2.	3.	48	Puskesmas Dukuh Kupang
436.	7.	2.	3.	49	Puskesmas Wiyung
436.	7.	2.	3.	50	Puskesmas Gayungan
436.	7.	2.	3.	51	Puskesmas Jemursari
436.	7.	2.	3.	52	Puskesmas Sidosermo
436.	7.	2.	3.	53	Puskesmas Kebonsari
436.	7.	2.	3.	54	Puskesmas Made
436.	7.	2.	3.	55	Puskesmas Bangkingan
436.	7.	2.	3.	56	Puskesmas Keputih
436.	7.	2.	3.	57	Puskesmas Balas Klumprik
436.	7.	2.	3.	58	Puskesmas Siwalankerto
436.	7.	2.	3.	59	Puskesmas Morokrembangan
436.	7.	2.	3.	60	Puskesmas Tambak Wedi
436.	7.	2.	3.	61	Puskesmas Bulak Banteng
436.	7.	2.	3.	62	Puskesmas Kalijudan
436.	7.	2.	3.	63	Puskesmas Sawah Pulo
436.	7.	2.	4		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
436.	7.	2.	5		UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
436.	7.	3			Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
436.	7.	3.	1		UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik
436.	7.	4			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
436.	7.	4.	1		UPTD Rumah Susun
436.	7.	5.			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
436.	7.	6.			Dinas Sosial

436.	7.	6.	1	UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih
436.	7.	6.	2	UPTD Kampung Anak Negeri
436.	7.	6.	3	UPTD Griya Wreda dan Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat
436.	7.	7.		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
436.	7.	8.		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
436.	7.	8.	1	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
436.	7.	9		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
436.	7.	9.	1	UPT Pusat Kesehatan Hewan
436.	7.	10		Dinas Lingkungan Hidup
436.	7.	10.	1	UPTD Pemakaman
436.	7.	11.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
436.	7.	12.		Dinas Perhubungan
436.	7.	12.	1	UPTD Pengelolaan Transportasi Umum
436.	7.	12.	2	UPT Parkir Tepi Jalan Umum
436.	7.	13.		Dinas Komunikasi dan Informatika
436.	7.	14.		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
436.	7.	14.	1	UPTD Metrologi Legal
436.	7.	15		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
436.	7.	16		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
436.	7.	16.	1	UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya
436.	7.	16.	2	UPTD Pengelolaan Objek Wisata
436.	7.	17		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
436.	7.	18		Satuan Polisi Pamong Praja
				BADAN
436.	8.	1		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
436.	8.	2		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
436.	8.	3		Badan Pendapatan Daerah
436.	8.	3.	1	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1
436.	8.	3.	2	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 2
436.	8.	3.	3	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3
436.	8.	3.	4	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 4
436.	8.	3.	5	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5
436.	8.	4.		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
436.	8.	5.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
436.	8.	6.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
436.	8.	7.		Badan Riset dan Inovasi Daerah
436.	8.	7.	1	UPT Kebun Raya Mangrove
				KECAMATAN
436.	9.	1		Kecamatan Asem Rowo
436.	9.	1.	1	Kelurahan Asem Rowo
436.	9.	1.	2	Kelurahan Genting Kalianak
436.	9.	1.	3	Kelurahan Tambak Sarioso
436.	9.	2		Kecamatan Benowo
436.	9.	2.	1	Kelurahan Kandangan
436.	9.	2.	2	Kelurahan Romokalisari
436.	9.	2.	3	Kelurahan Sememi
436.	9.	2.	4	Kelurahan Tambak Oso Wilangun

436.	9.	3		Kecamatan Bubutan
436.	9.	3.	1	Kelurahan Alun-Alun Contong
436.	9.	3.	2	Kelurahan Bubutan
436.	9.	3.	3	Kelurahan Gundih
436.	9.	3.	4	Kelurahan Jepara
436.	9.	3.	5	Kelurahan Tembok Dukuh
436.	9.	4		Kecamatan Bulak
436.	9.	4.	1	Kelurahan Bulak
436.	9.	4.	2	Kelurahan Kedung Cowek
436.	9.	4.	3	Kelurahan Kenjeran
436.	9.	4.	4	Kelurahan Sukolilo Baru
436.	9.	5		Kecamatan Dukuh Pakis
436.	9.	5.	1	Kelurahan Dukuh Kupang
436.	9.	5.	2	Kelurahan Dukuh Pakis
436.	9.	5.	3	Kelurahan Gunung Sari
436.	9.	5.	4	Kelurahan Pradah Kalikendal
436.	9.	6		Kecamatan Gayungan
436.	9.	6.	1	Kelurahan Dukuh Menanggal
436.	9.	6.	2	Kelurahan Gayungan
436.	9.	6.	3	Kelurahan Ketintang
436.	9.	6.	4	Kelurahan Menanggal
436.	9.	7		Kecamatan Genteng
436.	9.	7.	1	Kelurahan Embong Kaliasin
436.	9.	7.	2	Kelurahan Genteng
436.	9.	7.	3	Kelurahan Kapasari
436.	9.	7.	4	Kelurahan Ketabang
436.	9.	7.	5	Kelurahan Peneleh
436.	9.	8		Kecamatan Gubeng
436.	9.	8.	1	Kelurahan Airlangga
436.	9.	8.	2	Kelurahan Baratajaya
436.	9.	8.	3	Kelurahan Gubeng
436.	9.	8.	4	Kelurahan Kertajaya
436.	9.	8.	5	Kelurahan Mojo
436.	9.	8.	6	Kelurahan Pucang Sewu
436.	9.	9		Kecamatan Gunung Anyar
436.	9.	9.	1	Kelurahan Gunung Anyar
436.	9.	9.	2	Kelurahan Gunung Anyar Tambak
436.	9.	9.	3	Kelurahan Rungkut Menanggal
436.	9.	9.	4	Kelurahan Rungkut Tengah
436.	9.	10.		Kecamatan Jambangan
436.	9.	10.	1	Kelurahan Jambangan
436.	9.	10.	2	Kelurahan Karah
436.	9.	10.	3	Kelurahan Kebonsari
436.	9.	10.	4	Kelurahan Pagesangan

436.	9.	11.		Kecamatan Karang Pilang
436.	9.	11.	1	Kelurahan Karang Pilang
436.	9.	11.	2	Kelurahan Kebraon
436.	9.	11.	3	Kelurahan Kedurus
436.	9.	11.	4	Kelurahan Waru Gunung
436.	9.	12.		Kecamatan Kenjeran
436.	9.	12.	1	Kelurahan Bulak Banteng
436.	9.	12.	2	Kelurahan Sidotopo Wetan
436.	9.	12.	3	Kelurahan Tambak Wedi
436.	9.	12.	4	Kelurahan Tanah Kali Kedinding
436.	9.	13		Kecamatan Krembangan
436.	9.	13.	1.	Kelurahan Dupak
436.	9.	13.	2.	Kelurahan Kemayoran
436.	9.	13.	3.	Kelurahan Krembangan Selatan
436.	9.	13.	4.	Kelurahan Morokrembangan
436.	9.	13.	5.	Kelurahan Perak Barat
436.	9.	14		Kecamatan Lakarsantri
436.	9.	14.	1.	Kelurahan Lakarsantri
436.	9.	14.	2.	Kelurahan Bangkingan
436.	9.	14.	3.	Kelurahan Jeruk
436.	9.	14.	4.	Kelurahan Lidah Kulon
436.	9.	14.	5.	Kelurahan Lidah Wetan
436.	9.	14.	6.	Kelurahan Sumurwelut
436.	9.	15.		Kecamatan Mulyorejo
436.	9.	15.	1.	Kelurahan Dukuh Sutorejo
436.	9.	15.	2.	Kelurahan Kalijudan
436.	9.	15.	3.	Kelurahan Kalisari
436.	9.	15.	4.	Kelurahan Kejawaan Putih Tambak
436.	9.	15.	5.	Kelurahan Manyar Sabrangan
436.	9.	15.	6.	Kelurahan Mulyorejo
436.	9.	16		Kecamatan Pabean Cantian
436.	9.	16.	1	Kelurahan Bongkaran
436.	9.	16.	2	Kelurahan Krembangan Utara
436.	9.	16.	3	Kelurahan Nyamplungan
436.	9.	16.	4	Kelurahan Tanjung Perak
436.	9.	17		Kecamatan Pakal
436.	9.	17.	1	Kelurahan Babat Jerawat
436.	9.	17.	2	Kelurahan Benowo
436.	9.	17.	3	Kelurahan Pakal
436.	9.	17.	4	Kelurahan Sumber Rejo
436.	9.	18		Kecamatan Rungkut
436.	9.	18.	1.	Kelurahan Kalirungkut
436.	9.	18.	2.	Kelurahan Kedung Baruk
436.	9.	18.	3.	Kelurahan Medokan Ayu
436.	9.	18.	4.	Kelurahan Penjaringan Sari
436.	9.	18.	5.	Kelurahan Rungkut Kidul
436.	9.	18.	6.	Kelurahan Wonorejo

436.	9.	19		Kecamatan Sambikerep
436.	9.	19.	1	Kelurahan Beringin
436.	9.	19.	2	Kelurahan Lontar
436.	9.	19.	3	Kelurahan Made
436.	9.	19.	4	Kelurahan Sambikerep
436.	9.	20		Kecamatan Sawahan
436.	9.	20.	1	Kelurahan Banyu Urip
436.	9.	20.	2	Kelurahan Kupang Krajan
436.	9.	20.	3	Kelurahan Pakis
436.	9.	20.	4	Kelurahan Petemon
436.	9.	20.	5	Kelurahan Putat Jaya
436.	9.	20.	6	Kelurahan Sawahan
436.	9.	21		Kecamatan Semampir
436.	9.	21.	1	Kelurahan Ampel
436.	9.	21.	2	Kelurahan Pegirian
436.	9.	21.	3	Kelurahan Sidotopo
436.	9.	21.	4	Kelurahan Ujung
436.	9.	21.	5	Kelurahan Wonokusumo
436.	9.	22		Kecamatan Simokerto
436.	9.	22.	1	Kelurahan Kapasan
436.	9.	22.	2	Kelurahan Simokerto
436.	9.	22.	3	Kelurahan Sidodadi
436.	9.	22.	4	Kelurahan Simolawang
436.	9.	22.	5	Kelurahan Tambakrejo
436.	9.	23		Kecamatan Sukolilo
436.	9.	23.	1	Kelurahan Gebang Putih
436.	9.	23.	2	Kelurahan Keputih
436.	9.	23.	3	Kelurahan Klampis Ngasem
436.	9.	23.	4	Kelurahan Medokan Semampir
436.	9.	23.	5	Kelurahan Menur Pumpungan
436.	9.	23.	6	Kelurahan Nginden Jangkungan
436.	9.	23.	7	Kelurahan Semolowaru
436.	9.	24		Kecamatan Sukomanunggal
436.	9.	24.	1	Kelurahan Putat Gede
436.	9.	24.	2	Kelurahan Simomulyo
436.	9.	24.	3	Kelurahan Simomulyo Baru
436.	9.	24.	4	Kelurahan Sukomanunggal
436.	9.	24.	5	Kelurahan Sonokwijen
436.	9.	24.	6	Kelurahan Tanjungsari
436.	9.	25		Kecamatan Tambaksari
436.	9.	25.	1	Kelurahan Dukuh Setro
436.	9.	25.	2	Kelurahan Gading
436.	9.	25.	3	Kelurahan Kapasmadya Baru
436.	9.	25.	4	Kelurahan Pacarkeling
436.	9.	25.	5	Kelurahan Pacarkembang
436.	9.	25.	6	Kelurahan Ploso
436.	9.	25.	7	Kelurahan Rangkah
436.	9.	25.	8	Kelurahan Tambaksari

436.	9.	26		Kecamatan Tandes
436.	9.	26.	1	Kelurahan Balongsari
436.	9.	26.	2	Kelurahan Banjar Sugihan
436.	9.	26.	3	Kelurahan Karang Poh
436.	9.	26.	4	Kelurahan Manukan Kulon
436.	9.	26.	5	Kelurahan Manukan Wetan
436.	9.	26.	6	Kelurahan Tandes
436.	9.	27		Kecamatan Tegalsari
436.	9.	27.	1	Kelurahan Dr. Sutomo
436.	9.	27.	2	Kelurahan Kedungdoro
436.	9.	27.	3	Kelurahan Keputran
436.	9.	27.	4	Kelurahan Tegalsari
436.	9.	27.	5	Kelurahan Wonorejo
436.	9.	28		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
436.	9.	28.	1	Kelurahan Kendangsari
436.	9.	28.	2	Kelurahan Kutisari
436.	9.	28.	3	Kelurahan Panjang Jiwo
436.	9.	28.	4	Kelurahan Tenggilis Mejoyo
436.	9.	29.		Kecamatan Wiyung
436.	9.	29.	1	Kelurahan Babatan
436.	9.	29.	2	Kelurahan Balas Klumprik
436.	9.	29.	3	Kelurahan Jajar Tunggal
436.	9.	29.	4	Kelurahan Wiyung
436.	9.	30		Kecamatan Wonocolo
436.	9.	30.	1	Kelurahan Bendul Merisi
436.	9.	30.	2	Kelurahan Jemur Wonosari
436.	9.	30.	3.	Kelurahan Margorejo
436.	9.	30.	4	Kelurahan Sidosermo
436.	9.	30.	5	Kelurahan Siwalankerto
436.	9.	31		Kecamatan Wonokromo
436.	9.	31.	1.	Kelurahan Darmo
436.	9.	31.	2	Kelurahan Jagir
436.	9.	31.	3	Kelurahan Ngagel
436.	9.	31.	4	Kelurahan Ngagel Rejo
436.	9.	31.	5	Kelurahan Sawunggaling
436.	9.	31.	6	Kelurahan Wonokromo

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI